

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi menurut Adams (dalam Syafri, 2018:8) adalah kemampuan mengkoordinasi berbagai kekuatan yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai suatu kesatuan.

Dari batasan di atas ditemukan ide pokok sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial di dalam satu organisasi.
2. Kekuatan itu di padukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Adapun menurut Siagian Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang atau lebih yang di dasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (dalam Syafri, 2012:9).

Administrasi berdasarkan definisi ahli di atas dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian usaha yang dilakukan bersama dan saling berkaitan antara satu dan yang lain yang penyelenggaraannya membutuhkan wadah agar dapat mencapai tujuan yaitu organisasi. Penulis mengartikan administrasi sebagai suatu konsep yang belum terlaksanakan dan akan terwujud dengan menggunakan

organisasi, pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa pendapat ahli berikut;

Syafri (2012;11) batasan Administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkain kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

White (dalam Syafri, 2012;9) menjelaskan administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha pada setiap kelompok, publik, atau privat, sipil atau militer, skala besar atau skala kecil.

Menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;9) administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

Administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengolahan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukab oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli, 2005;16)

Selain itu Pasolong (2007;3) didalam bukunya juga mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Sedangkan menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong (2010;7) mendefinisikan administrasi publik adalah :

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengusaha arahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Jadi, Administrasi merupakan rangkaian aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kerjasama yang terarah dalam organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien, unsur-unsur diatas akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri di tengah-tengah birokrasi pemerintahan dan akan menjadi landasan utama untuk sebuah adminitrasi yang baik dalam melaksanakan tugas Negara.

2. Konsep Administrasi Publik

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2008;2) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan administrasi publik menurut McCurdy (dalam Keban, 2014;3) bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai

salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara, dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik.

Jadi administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Harus diakui bahwa ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014;8) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) berikut :

1. Organisasi publik yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi.
2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan system dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

3. Konsep Organisasi

Organisasi yang merupakan alat untuk merealisasikan konsep yang telah dipikirkan pada proses administrasi merupakan hal penting karena disinilah tempatnya orang bisa bekerjasama yang dapat dijadikan alat mengumpulkan

orang-orang dengan tujuan yang sama. Penulis mengibaratkan administrasi tanpa organisasi bagai air tanpa wadah tidak akan sampai kepada yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan beberapa definisi organisasi yang dikemukakan para ahli.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005;25) merumuskan definisi organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara optimal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yan terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Menurut Winardi (2009;15) didalam bukunya menggambarkan dan menjelaskan sebuah organisasi itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Hasibuan (2014;120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Berdasarkan definisi diatas yang dikemukakan para ahli terlihat bahwa administrasi dan organisasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya. Organisasi berjalan tergantung pada proses administrasinya. Dalam organisasi prinsip juga diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang, prinsip ini harus dijadikan sebgaai pedoman bagi para penyelenggaranya.

Berikut ini terdapat dua belas prinsip organisasi menurut Siagian (2008;97)

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orng dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah
- e. Adanya kesatuan perintah
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
- l. Penempatan yang sesuai dengan keahlian.

Selain prinsip organisasi juga memiliki beberapa bentuk, dikarenakan organisasi adalah sesuatu yang dinamis, yang menyesuaikan kedinamisannya dengan kedinamisan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun bentuk organisasi menurut Siagian (2008;100) yaitu :

- a. Organisasi Lini
- b. Organisasi Lini dan Staf
- c. Organisasi Fungsional
- d. Organisasi Type Panitia
- e. Organisasi Matriks

Jadi, organisasi sebagai wadah penyatuan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kerja sama antara satu atau beberapa orang yang disebut bawahan yang terstruktur kearah pencapaian tujuan organisasi, definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. Organisasi juga sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

4. Konsep Organisasi Publik

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;6) organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasannya dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut E. Wight Bakke (dalam Kusdi, 2009;5) organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan
Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi.
2. Esensi Organisasi
Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.
3. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka.

4. **Spesialisasi untuk Efisiensi**

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

5. **Rentang Kendali**

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

5. Konsep Manajemen

Dalam mengatur, menyusun dan mengarahkan orang-orang yang ada didalam organisasi, untuk bekerja sama dengan searah, sejalan dalam mencapai tujuan diperlukan manajemen, yang berfungsi yang berfungsi mengarahkan dan mengatur sumber daya manusia seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Siagian (2008;5) mendefinisikan dari dua pandangan yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Terry (dalam Hasibuan, 2014;3) manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Semakin jelas bahwa manajemen merupakan salah satu hal penting yang diperlukan perannya demi jalannya organisasi, kunci dari manajemen adalah pemimpin dalam organisasi tersebut, karena yang menjalankan manajemen adalah seorang pemimpin didalam organisasi.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2009;47) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Gie (dalam Zulkifli, 2009;16) menyatakan manajemen sebagai sebuah proses memiliki enam fungsi utama yaitu :

1. Perencanaan
2. Pembuatan Keputusan
3. Pengarahan
4. Pengoordinasian
5. Pengontrolan
6. Penyempurnaan

Dari sekian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan penggabungan kemampuan dan keterampilan mengembangkan pendekatan dan strategi untuk membangun semangat kerja dengan cara memberikan motivasi atau dorongan agar para personil merasa tidak terbebani dan sukarela untuk bekerja sama sehingga tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tercapai.

Dapat penulis simpulkan dari beberapa pengertian manajemen diatas , bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain dengan memanfaatkan potensinya dan menggunakan seni sehingga orang lain tersebut tidak merasa terbebani dan merasa rela, tidak terpaksa, dengan pemabagian kerja yang sesuai, dan jelas serta feedback yang sesuai dengan kinerja orang lain tersebut. Manajemen ini dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin didalam organisasi karena hanya pemimpin yang memiliki wewenang dalam mengatur para bawahan.

6. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah *mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, Dan Keadilan)* dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas da antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secara efektif.

Dari berbagai kepustakaan dapat di ungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *Public Policy*, yaitu suatu aturan kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh

warganya. Bukan sekedar diatur, melainkan diatur oleh peraturan yang *berlaku untuk semuanya dan berlaku mengikat semuanya*. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Sementara itu pakar kebijakan public mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan Thomas 1992 (dalam buku Nugroho 2008;124)

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam *kybernology* adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan faktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan, Dye merumuskan model kebijakan antara lain menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model incremental, model model teori permainan, model pilihan publik, dan model sistem.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Jenkins didalam buku *The Policy Process* sebagai

kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Selanjutnya Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai : *“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.* (Hill,1993)

Menurut Nugroho 2004; 126 Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu :

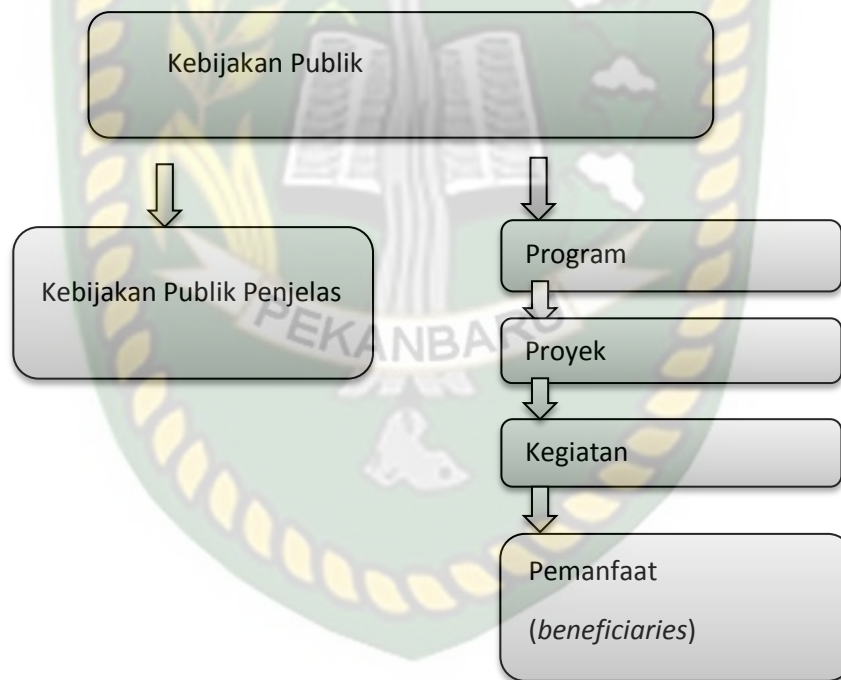
- a. Dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan
- b. Bagaimana kebijakan publik tersebut di implementasikan
- c. Bagaimana kebijakan tersebut dievaluasikan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealistiskan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat

Dari sini kita bisa melakukan “kebijakan publik” sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional”. Dapat kita disimpulkan bahwa :Kebijakan publik mudah untuk dipahami karena maknanya adalah “hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.”Dan Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapain cita-cita sudah ditempuh.

7. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber : Nugroho (2008; 675) Public Policy

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model

tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Menurut Van Meter dan Van Hon dalam Wahab (2014:135) Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individual / pejabat – pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci bukan hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam arti seluas – luasnya, Implementasi juga sering diangkap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang – undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara berbagai pemangku kepentingan, aktor organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan.

8. Konsep Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang pengertiannya menurut Poerwadarminta (1987) adalah:

Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara dalam sidang (diskusi, rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur yang baik.

Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam konsisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tertib.

Menurut J.S Badudu (1987) mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Sedangkan pengertian dalam masyarakat menurut Poerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).

Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa : ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

9. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab 1 (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat Satpol pp adalah bagian dari perangkat Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah (perda) dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenraman masyarakat. Polisi pamong praja adalah anggota Satpol pp sebagai aparat pemerintah Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III (5) Menyatakan, Tugas dan Fungsi Satuan polisi pamong praja adalah :

1. Penyusun program dan pelaksanaan penegakan perda ,peyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
 3. Pelaksanaan kebijakan peyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
 4. Pelaksaaan kebijakan perlindungan masyarakat
 5. Pelaksaaan kordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah
 6. Pengawasan terhadap masyarakat ,apartur,atau badan hukum agar memenuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
 7. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah
- Selanjutnya dalam Bab III (8) PP nomor 6tahun 2010 disebutkan

mengenai kewajibab Satpol pp dalam melaksanakan Tugasnya yaitu:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma social lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negari sipil dan kode etik polisi pamong praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat, menggagu ketertiban umum dan ketenraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada kepolisan Negara Rebbublik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
- e. Menyerahkan kepada peyidik pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda atau peraturan daerah

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya polisi pamong praja melakukan berbagai cara sepertimemberikan penyuluhan. Kegiatan ptroli dan penertiban terhdapa pelanggaran peraturan daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringan lisan maupun tertulis.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat sejarah pembentuk polisi pamong praja yang keberradaan tidak dapat disamakan dengan polisi khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas serta berbeda pula perwujudan system Hamkarata). Pembentukan polisi pamong praja tidaklepas dri tuntutan

situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu polisi pamong praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.

8. Konsep Pedagang kaki lima

Menurut Kartini Kartono (1980) dalam Hassel Nogi S.Tanglissan (2004-203) mendefenisikan pedagang kaki lima adalah :

1. Kelompok ini yang merupakan kadang-kadang juga berarti produsen sekaligus (misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri)
2. Peralatan kaki lima memberi konotasi, bahwa mereka pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan dipinggir jalan, atau dimuka toko
3. Pedagang kaki lima pada umumnya bermodal kecil

An Nal (1983:30) dalam Hassel Nogi S.Tanglissan (2004-202) Istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan penjajahan belanda, diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung feet sama dengan kaki kira-kira 31 senti meter lebih sedikit.

Pedagang kaki lima merupakan sector informal yang terdapat baik didaerah perkotaan maupun desa, sector informal yang berada didesa disebut tradisional, sedangkan yang diperkotaan tetap disebut sector informal.

B. Kerangka Pikir

Administrasi dan manajemen public merupakan suatu seni dan ilmu kerjasama dari dua orang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu

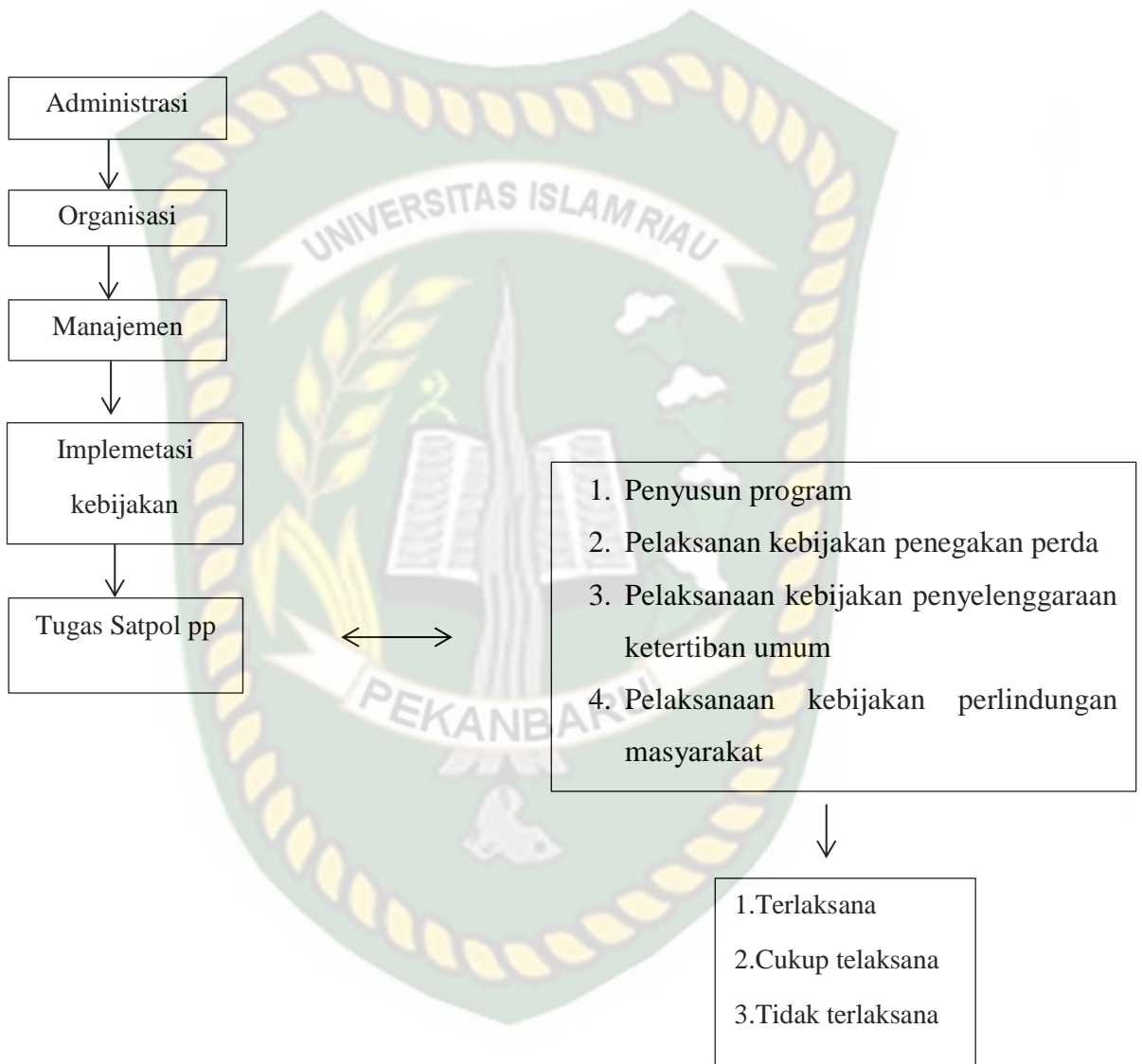
pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan.

Usaha untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan disebut kebijakan publik. Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas di antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secara efektif.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik.

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu intansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat sesuai atau berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara tugas pokok dan fungsi, suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugasn pokok

Gambar 2.1 : Kerangka pikir Implemetasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan Hulu.



C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini,

maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengatur variabel tersebut).

Maka, penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dimana penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

1. Administarsi, merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Administrasi Publik, merupakan menyangkut kerja sama kelompok orang dalam lingkup organisasi Negara (legislative, eksekutif, dan yudikatif) untuk mencapai tujuan Negara melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya.
3. Manajemen Kebijakan Publik, merupakan sebagai proses terdiri atas tiga dimensi pokok, yaitu perumusan, implementasi, dan pengendalian. Bagian terakhir bersifat khusus dan sedikit berbeda karena lazimnya pada proses kebijakan yang ada hanyalah monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan
4. Kebijakan Publik, merupakan mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas da antara komunitas dengan

lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif.

5. Implementasi Publik, merupakan kemampuan meminimalkan penggunaan sumber daya secara benar dan tepat dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dengan ditandai bahwa implementasi kebijakan publik suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan beberapa indikator yaitu hemat, benar, tepatwaktu, kebutuhan, kepuasan, alternative, kordinasi, penerapan, pengambilan keputusan, dan tanggungjawab serta evaluasi kebijakan.
6. Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu intansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat sesuai atau berdasarkan tujuan ,visi dan misi suatu organisasi.tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara tugas pokok dan fungsi ,suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugasn pokok
7. Tanggung Jawab, merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya dan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadara akan kewajiban.

8. Sosialisasi, merupakan memberikan penyuluhan atau informal kepada pihak-pihak dan masyarakat
9. Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Penyusunan program adalah penyusunan sederatan rancangan atau usaha kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu terdiri dari :
 - a. Membentuk tim Satuan pengamanan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima, petugas membuat tim terlebih dahulu sebelum turun kelokasi yang akan ditertibkan.
 - b. Membuat rencana penertiban yaitu untuk mengetahui suatu kegiatan bidang Tugas dan fungsi yang telah dirinci yang akan dilaksanakan.
11. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda terdiri dari:
 - a. Melakukan razia rutin yang akan dilakukan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima
 - b. Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum yang akan diberikan kepada pedagang kaki lima
12. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum terdiri dari :
 - a. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum
 - b. Memberikan sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum
13. Pelaksanan kebijakan perlindungan masyarakat terdiri dari :
 - a. Memberikan Kenyamanan bagi masyarakat

- b. Memberikan keamanan bagi masyarakat

(sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir)

D. Operasional Variabel

Tabel 2.1. : Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki lima di Kecamatan Tembilahan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	SOP(Item Penilaian)	Penilaian
1	2	3	4	5
kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, megapa kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada	Implementasi Kebijakan	1. penyusun program	a. membentuk tim pengamanan satpol pp b. membuat rencana penertiban	Baik Cukup baik Kurang baik
		2. pelaksanaan kebijakan penegakan perda	a. melakukan razia rutin b. melakukan saosialisasi tentang perda ketertiban umum	Baik Cukup baik Kurang baik
		3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum	a. melakukan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum	Baik Cukup baik Kurang baik

1	2	3	4	5
yang diuntungkan da nada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan Thomas 1992 (dalam buku Nugroho 2008;124)			b. memberikan sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	
		4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat	a. memberikan kenyamanan b. memberikan keamanan	Baik Cukup baik Kurang baik

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tembilahan Hulu, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variable penelitian yaitu:

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada persentase 67-100%.

Cukup baik : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada persentase 34-66%.

Kurang baik : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada persentase 1-33%.

Indikator Ukuran Variabel

Adapun ukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Penyusunan Program

Baik : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup baik : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada persentase 1-33%

2. Dilihat dari Pelaksanaan kebijakan penegakan perda

Baik : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup baik : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada persentase 1-33%

3. Dilihat dari Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum

Baik : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup baik : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada persentase 1-33%

4. Dilihat dari Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

Baik : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup baik : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada persentase 1-33%

